



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2018

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 050 / 112 . a / 112 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2018**

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2018 dan menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2018 yang sudah diverifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebelum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah diperlukan pengesahan oleh Walikota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Magelang tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018.

KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2018 untuk Perangkat Daerah se-Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Agustus 2018

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 050 / 112.2 / 112 TAHUN 2018

TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2018

DAFTAR PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60.718.379.000
2	Dinas Kesehatan	47.419.111.000
3	Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Tidar	236.853.947.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75.043.697.000
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	51.158.455.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.334.218.000
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.284.145.000
8	Dinas Sosial	2.800.832.000
9	Dinas Tenaga Kerja	4.490.664.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	41.455.147.000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.705.055.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.358.958.000
13	Dinas Perhubungan	9.973.779.000
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	10.584.584.000
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.680.156.000
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	12.404.617.000
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.701.518.000
18	Dinas Pertanian dan Pangan	8.672.843.000
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.785.276.000
20	Sekretariat Daerah	29.709.662.000
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26.593.042.000
22	Kecamatan Magelang Selatan	8.388.282.000
23	Kecamatan Magelang Tengah	8.194.284.000
24	Kecamatan Magelang Utara	8.050.115.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
25	Inspektorat	3.291.072.000
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.482.224.000
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20.084.732.000
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.086.446.000
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.512.469.000
	TOTAL	724.817.709.000

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Telp (0293) 363530 Fax. (0293) 3276696

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG**

NOMOR 050 / 211 / 440 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(RENJA PERUBAHAN OPD)

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan mempunyai rencana kerja perubahan (Renja Perubahan OPD) sebagai penjabaran dari rencana lima tahunan (Renstra OPD);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2005-2010;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
20. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2016 tentang Pengesahan Perubahan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;
21. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.23/151/112 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2018;
22. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050/112.a/112 Tahun 2018 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2018;

23. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Nomor 900/649/440 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2018.
- KEDUA : Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Nomor 900/649/440 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021 ini.
- KETIGA : Sistematika Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 disusun sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2018
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB IV PENUTUP
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Agustus 2018

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA MAGELANG**



LARSITA, SE, MSc

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018	9
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 dan Capaian Indikator sampai dengan Semester	9
B. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang	18
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPKAD Kota Magelang	21
D. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD	25
BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	27
B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30
C. Program dan Kegiatan	33
BAB IV PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang s/d Triwulan II Tahun 2018 ..	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang	19
Tabel 3.1	Identifikasi Isu-Isu Strategis Pelayanan OPD	28
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021..	31
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Dan Perubahan Tahun 2018	36

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama kali harus dilaksanakan mengambil peran penting dalam suatu organisasi. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional, maka pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Seiring dengan berjalannya waktu peraturan perundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah juga mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga memberikan dampak pada perubahan aturan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Mengacu pada RPJPD Kota Magelang 2005-2025 maka RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 merupakan RPJMD Tahap III. Demikian pula Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 yang juga telah disahkan dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.13/205/112 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kota Magelang Tahun 2016-2021, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada Pemerintah Kota Magelang. Perubahan Renstra Perangkat Daerah tersebut sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang berdampak pada perubahan urusan dan perangkat daerah yang terlibat.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;

3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2018; dan/atau
4. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat perubahan renja perangkat daerah merupakan penjabaran dari renstra perangkat daerah maka program dan kegiatan yang ada di perubahan renja perangkat daerah harus tercantum dalam renstra perangkat daerah tahun rencana. Program/kegiatan alternatif dan/atau baru dapat digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD;
3. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
4. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD.

Dengan kata lain perubahan renja perangkat daerah 2018 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Disamping itu dalam penyusunan program/kegiatan juga memperhatikan capaian kinerja SPM yang ada serta pembangunan berperspektif gender yang dilakukan melalui analisis gender.

Penyusunan perubahan renja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang Tahun 2018 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2018, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2018. Rancangan perubahan renja

tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyesuaian akhir dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota, maka rancangan perubahan renja perangkat dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah mendapat pengesahan dari Walikota.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018.

2. Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2018 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renja OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 050/112.2/112 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 050/ 211 /440 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018

- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 dan Capaian Indikator sampai dengan Semester I
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- D. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 dan Capaian Indikator sampai dengan Semester I

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 sampai dengan Semester I adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:
 - a. Kegiatan Verifikasi, Validasi, Penghapusan Data Piutang PBB;
 - b. Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan;
 - c. Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
2. Dari 7 (tujuh) program dan 122 (seratus dua puluh dua) kegiatan yang dianggarkan pada Tahun 2018 maka prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan/berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan mencapai sebesar 97,54% atau 119 (seratus sembilan belas) kegiatan. Dengan asumsi bahwa ke-seratus dua puluh dua kegiatan tersebut ada yang melampaui target, sama dengan target dan dibawah target. Adapun kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kegiatan yang terbagi dalam 2 (dua) program.
3. Jika dilihat dari tingkat penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan untuk Tahun 2018 sampai dengan triwulan II baru mencapai 34,03% atau sebesar Rp. 5.813.483.682,- dari total anggaran sebesar Rp. 17.081.337.000,-. Adapun target fisik yang harus dicapai sebesar 59,64% dengan realisasi mencapai nilai 60,81%.

4. Kegiatan yang tidak terdapat di dalam Renstra namun terdapat dalam Renja yaitu Kegiatan Pengadaan Mebeler Barang Pengelola, Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Barang Pengelola, Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Barang Pengelola, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Barang Pengelola. Hal ini dalam rangka mendukung terwujudnya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Secara umum faktor penyebab tidak/kurang tercapainya target hasil/keluaran untuk kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan keterbatasan SDM aparatur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Disamping itu juga adanya ketentuan peraturan perundangan yang baru berlaku, sehingga beberapa kegiatan harus menyesuaikan aturan baru tersebut.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sampai dengan triwulan II tahun 2018 adalah sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG S/D TRIWULAN II TAHUN 2018*)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018) *)	Realisas i Progra m dan Kegiat an (Renja Perangk at Daerah Tahun 2018) *)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017		Tingkat Realisas i (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10	11	12
2.18 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Teradministrasinya surat-surat dinas	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12 bulan	50%	12 bulan	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya kebutuhan komunikasi, air, listrik dan internet untuk memperlancar pelaksanaan tugas	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12 bulan	50%	12 bulan	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya surat-surat kendaraan sesuai ketentuan	64	unit	61	unit	77	STNK	77	STNK	100%	64 unit	100%	77 STNK	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terpenuhinya personil pengelolaan keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12 bulan	50%	12 bulan	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan di lingkungan BPKAD	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12 bulan	55%	12 bulan	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	meningkatnya kelancaran tugas dinas	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12 bulan	66%	12 bulan	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	meningkatnya kelancaran tugas-tugas dinas	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12 bulan	50%	12 bulan	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12 bulan	50%	12 bulan	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	menambah wawasan pengetahuan aparatur	2	jenis	2	jenis	2	jenis	2	jenis	100%	2 jenis	92%	2 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	terpenuhinya logistik kantor	24	tabung	24	tabung	24	tabung	24	tabung	100%	24 tabung	50%	24 tabung	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, rapat dan tamu	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12 bulan	67%	12 bulan	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tercapainya koordinasi antar daerah	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12 bulan	77%	12 bulan	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	tersedianya tenaga kontrak , petugas keamanan dan petugas lapangan	23	orang	7	orang	23	Orang	23	Orang	100%	23 orang	50%	23 orang	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	kelancaran urusan kepegawaian	82	file	82	file	82	file	82	file	100%	82 dokumen	50%	82 file	100%

4.04 . 4.04.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur														
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor			6	jenis	3	jenis	3	jenis	100%	12 jenis	100%	3 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung terpelihara	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100%	1 unit	82,50%	1 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas	64	unit	61	unit	70	unit	70	unit	100%	64 unit	55%	70 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	33	unit	34	unit	41	unit	41	unit	100%	33 unit	62%	41 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kantor	7	jenis	8	jenis	7	jenis	7	jenis	100%	7 jenis	60%	7 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya sarana kerja kantor	20	buah	20	buah	29	buah	29	buah	100%	20 buah	100%	29 buah	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terbangunnya tempat parkir mobil, kanopi dan gudang di lingkungan BPKAD			3	unit	237,00	m2	237,00	m2	100%	240 m2	100%	237 m2	100%
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	tercapainya target kinerja skpd	12	dokumen	12	bulan	12	dokumen	12	dokumen	100%	12 dokumen	50%	12 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	tersedianya laporan keuangan semesteran, prognosis dan akhir tahun	3	laporan	3	jenis	2	jenis	2	jenis	100%	5 jenis	10%	2 jenis laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	terwujudnya pedoman rencana kerja skpd	2	dokumen	2	jenis	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	35%	2 jenis dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	terwujudnya pelaksanaan anggaran	2	dokumen			2	dokumen	2	dokumen	100%	1 dokumen	35%	2 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	terwujudnya renstra OPD 5 tahunan					1	dokumen	1	dokumen	100%			1 dokumen	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	spj yang diverifikasi dan disahkan	12	bulan	12	bulan	1.800	berkas	1.800	berkas	100%	1.000 berkas	50%	1.800 berkas	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja skpd	1	dokumen	1	jenis	1	dokumen	1	dokumen	100%	2 dokumen	100%	1 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah														
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Sebagai pedoman bagi pengelola keuangan di jajaran Pemerintah Kota Magelang	1	Perwal	75	buku	75	buku	75	buku	100%	1 dokumen	10%	75 buku	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Penetapan Perda tentang APBD TA. 2018	4	dokumen			4	dokumen	4	dokumen	100%	4 dokumen	30%	4 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Penetapan Perwal tentang penjabaran APBD TA. 2018	3	dokumen			3	dokumen	3	dokumen	100%	3 dokumen	5%	3 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2017	4	dokumen			4	dokumen	4	dokumen	100%	4 dokumen	36%	4 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penetapan Perwal tentang penjabaran Perubahan APBD 2017	4	dokumen			4	dokumen	4	dokumen	100%	4 dokumen	48%	4 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan Keuangan yang Akuntabel	520	buku	468	buku	1	perda	1	perda	100%	520 buku	88%	1 perda	100%

4.04 . 4.04.01 . 15 . 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	120	buku	120	buku	1	perwal	1	perwal	100%	120 buku	95%	1 perwal	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Menambah kelancaran pelaksanaan tugas					2	aplikasi	2	aplikasi	100%	29 OPD	100%	2 aplikasi	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	3	laporan	3	jenis	3	laporan	3	laporan	100%	1 aplikasi	58%	3 jenis laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16	Penataan dokumen pencairan dana belanja langsung secara elektronik	Tertatanya dokumen pencairan dana belanja langsung elektronik										4 dokumen	47%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	Termonitornya dan terpenuhinya laporan posisi kas daerah kepada Kementerian Keuangan RI setiap bulan										12 laporan	53%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Nota Kesepakatan KUA 2018	2	dokumen	135	buku	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Nota Kesepakatan PPAS 2018	2	dokumen	135	buku	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Nota Kesepakatan KUPA 2017	2	dokumen	135	buku	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	5%	2 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKPA 2017	2	dokumen	135	buku	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	60%	2 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD sesuai dengan Perda dan Perwal APBD 2018	48	SKPD	135	buku	29	opd	29	opd	100%	48 SKPD		29 OPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang disahkan	48	SKPD	48	skpd	29	opd	29	opd	100%	48 SKPD		29 OPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	Tertib Administrasi	370	berkas	360	berkas	500	bekas	500	bekas	100%	370 berkas	52%	500 berkas	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Sebagai pengendali dalam pelaksanaan pengeluaran belanja	100	%	3000	SP2D	3.000	SP2D	3.000	SP2D	100%	3000 SP2D	50 %	3000 SP2D	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32	Pengesahan dan penerbitan SPD	Sebagai dasar penerbitan SP2D	100	%	170	SP2D	170	SP2D	170	SP2D	100%	100	57%	170 SPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	612	buku	612	buku	12	dokumen	12	dokumen	100%	12 dokumen	50%	12 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	552	laporan	552	laporan	348	laporan OPD	348	laporan OPD	100%	348 laporan OPD	56%	348 laporan OPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43	Pengendalian dan penerbitan SPM	terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja skpd			1500	SPM	1.800	spm	1.800	spm	100%	700 SPM	50%	1800 spm	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan	100	%	48	SKPD	48	SKPD	48	SKPD	100%	29 OPD	78%	29 OPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48	Penyusunan laporan pajak	tersedianya laporan pajak setiap bulan	84	buku	84	buku	12	laporan	12	laporan	100%	12	50%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	Laporan anggaran lebih transparan dan akuntabel	2	laporan	2	laporan	2	laporan	2	laporan	100%	2	50%	3 Laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51	Penyusunan anggaran kas	Sebagai rencana penarikan dana pada setiap triwulan	100	%	75	buku	170	dokumen	170	dokumen	100%	10 kegiatan	54%	170 Dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPKA sesuai dengan Perda dan Perwal penjabaran perubahan APBD 2017	48	SKPD	48	SKPD	29	OPD	29	OPD	100%	29		29 OPD	100%

4.04 . 4.04.01 . 15 . 53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA opd yang disyahkan	48	SKPD	48	SKPD	48	SKPD	48	OPD	100%	29		48 opd	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56	Penataan Dokumen Anggaran Elektronik	Kemudahan dalam mengakses arsip dokumen anggaran	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	29	50%	12 bulan	50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	SP2D bantuan dan tak terduga sesuai dengan jumlah permohonan bantuan	100	%			2.500	berkas	2.500	berkas	100%	800 berkas	56%	2.500 berkas	30%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59	Penyusunan data keuangan daerah	Tersusunnya data keuangan daerah yang akuntabel	100	%								12 laporan	52%	5 paket	50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Terkoordinasinya dan terdatanya tertib administrasi laporan	100	%			12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	60%	12 laporan	50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	Laporan bulanan PPKD	100	%	12	bulan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	36%	12 laporan	50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	Meningkatnya kapasitas pengelola keuangan sekolah dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah										148 orang	54%	148 orang	54%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah										1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya laporan Keuangan yang Akuntabel	100	orang	60	orang	100	orang	100	orang	100%	120 orang	62,50%	100 orang	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	SP2D SKPD sebagai Alat akuntabilitas keuangan SP2D	1350	SP2D	1350	SP2D	1.400	SP2D	1.400	SP2D	100%	1.100 SP2D	50%	1.400 SP2D	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja skpd	88	buku			1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen		1 Dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	Kelancaran administrasi bansos	100	%	12	bulan	1.500	berkas	1.500	berkas	100%	1.500 berkas	50%	1500 Berkas	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	Akuntabilitas keuangan SP2D	100	%			3.000	berkas	3.000	berkas	100%	4 jenis informasi	56%	3.000 berkas	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	Tersedianya pedoman penganggaran kegiatan	3	dokumen	185	buku	3	dokumen	3	dokumen	100%	3 dokumen	100%	3 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan tersedianya lapora			4	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	56%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107	Pembuatan Daftar Gaji	SP2D SKPD sebagai Alat akuntabilitas keuangan _ SP2D					1.400	SP2D	1.400	SP2D	100%	470 daftar gaji	52%	1.400 SP2D	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	Terciptanyanya sistem penganggaran yang tepat dan sistematis di jajaran Pemerintah Kota Magelang	1	Perwal			1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertatanya seluruh database pengelolaan keuangan guna memperlancar pelaksanaan tugas.					1	laporan	1	laporan	100%	4 laporan	54%	1 Laporan	100%

4.04 . 4.04.01 . 15 . 115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	Tersusunnya laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang Akuntabel										29 OPD	50%	29 OPD	50%
2.18 . 4.04.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah														
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	pengamanan arsip dppkd kota magelang	6	bidang			40.000	dokumen	40.000	dokumen	100%	40.000 dokumen	58%	40.000 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah														
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	4	laporan	100	wajib pajak	4	laporan	4	laporan	100%	4 laporan	69%	4 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	Tersusunnya Data Potensi Pajak Daerah	2	laporan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	100%	4 laporan	68%	4 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03	Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan PAD Dan PBB	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PBB	12	laporan	12	laporan	12	kali	12	kali	100%	12 laporan	63%	12 kali	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	Tersedianya laporan perkembangan realisasi PAD	12	laporan			12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	57%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggal Pajak Daerah	Terselesaikannya Tunggal Pajak Daerah	120	laporan			120	Wajib Pajak	120	data wajib pajak	100%	120 WP	55%	120 data wajib pajak	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06	Intensifikasi Pemungutan PBB	Tercapainya Target Penerimaan PBB-P2, tercapainya pendistribusian PBB, Pelaksanaan PBB Panutan, dan Pemberian Penghargaan Kepada Kelurahan, RW, RT, Wajib Pajak	4	kegiatan	4	keg	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	3 kegiatan	95%	4 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	Tertib Administrasi PBB-P2	28	laporan	12	laporan	28	laporan	28	laporan	100%	28 laporan	53%	28 Laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB Dan Pajak Air Tanah	Tercapainya target PAD	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	24 laporan	62%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	Terbitnya SPPT, SSPD, DHKP dan DHR PBB	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12 bulan	52%	12 Bulan	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10	Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	Tercapainya target PAD	12	laporan			12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	56%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	Data piutang PBB-P2 yang valid	6	bulan	2	jenis	6	bulan	6	bulan	100%	6 bulan	100%	6 bulan	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya pengelolaan yang akuntabel	12	laporan			12	laporan	12	laporan	100%	12 bulan	57%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	meningkatnya pendapatan dan tertib administrasi wajib pajak	20	laporan			200	wajib pajak	200	wajib pajak	100%	4 LHP WP	100%	4 wajib pajak	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	terwujudnya tertib administrasi dan terinformasikannya realisasi pencairan dan penyerapan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan					16	laporan	16	laporan	100%	16 laporan	58%	16 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	Adanya kenaikan estimasi potensi PBB-P2	100	Objek Pajak			17	kelurahan	17	kelurahan	100%	17 kelurahan	54%	17 Kelurahan	100%

4.04 . 4.04.01 . 18 . 16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	Tercapainya target PAD					350	wajib pajak	350	wajib pajak	100%	540 WP	57%	350 wajib pajak	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	Terselesaikannya Pengajuan Keberatan dan Pengurangan Wajib Pajak	50	SK	50	sk	50	SK	50	SK	100%	50 SK	54%	50 SK	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 23	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah	Terselenggaranya sistem pendapatan daerah yang tepat dan sistematis jajaran pemerintah kota Magelang					1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	68%	1 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	Tersedianya data untuk dijual					1	kegiatan	1	kegiatan	100%	3 kegiatan	92%	1 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	Termanfaatkannya aset secara optimal	100	%			1	tahun	1	tahun	100%	10 kegiatan	40%	1 tahun	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 03	Pemusnahan Barang Milik Daerah	Surat persetujuan pemusnahan					1	kegiatan	1	kegiatan	100%	1 dokumen	100%	1 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	Berita acara penelitian dan penjualan dan/atau pemusnahan					3	kegiatan	3	kegiatan	100%	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 06	Pembangunan Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Magelang	Jalan di Komplek belakang kantor walikota Magelang					2	jenis	2	jenis	100%	1 paket	100%	2 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	Terwujudnya sarana olahraga pengelola barang yang layak dan nyaman	100	%			2	lapangan	2	lapangan	100%	2 lapangan	51%	2 lapangan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	meningkatnya kenyamanan tugas	100	%			3	unit	3	unit	100%	3 unit	77%	3 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11	Peningkatan Manajemen Aset/barang daerah	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan BMD	12	bulan			12	bulan	12	laporan	100%	12 kegiatan	70%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12	Penghapusan Asset	Terhapusnya aset-aset pemkot yang sudah tidak layak							1	paket		2 paket	100%	5 paket	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 13	Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	Terpantaunya pengelolaan barang milik daerah	3	kegiatan			16	orang	16	orang	100%	16 orang	57%	16 orang	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Tersedianya informasi barang milik daerah	6	laporan			6	jenis	6	jenis	100%	8 jenis	55%	6 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15	Penjualan aset daerah	Bertambahnya pendapatan asli daerah	1	kegiatan			5	paket	5	paket	100%	3 paket	73%	5 paket	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16	Penyelamatan aset daerah	Teramankannya aset-aset daerah	12	kegiatan			12	bulan	12	bulan	100%	12 bulan	63%	12 bulan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17	Penaksiran barang milik daerah	Tersedianya data dalam rangka tindak lanjut atas aset yang telah ditaksir	4	kegiatan			4	kegiatan	4	kegiatan	100%	4 kegiatan	80%	6 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Peningkatan kemampuan petugas pengelola BMD	4	kegiatan			4	kegiatan	4	kegiatan	100%	29 OPD	56%	4 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah (PAD)	3	kecamatan			3	kecamatan	3	kecamatan	100%	7 kategori	68%	3 kecamatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah	2	dokumen			2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	52%	2 dokumen	100%

4.04 . 4.04.01 . 19 . 21	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Peningkatan penatagunaan tanah Pemkot dan tersedianya data tanah Pemkot yang akurat	3	laporan			300	%	3	kecamatan	1%	12 bidang	55%	3 kecamatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	Terkendalinya pemberian hak atas tanah negara	100	%			100	%	100	%	100%	100 %	74%	100 %	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen bukti kepemilikan aset tanah Pemkot	12	bidang			12	bidang	18	bidang	100%	12 bidang	62%	24 bidang	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Tersedianya data tanah milik Pemkot yang mutakhir	1	kegiatan			1	laporan	1	laporan	100%	1 laporan	3%	1 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	Terwujudnya batas fisik tanah	2	bidang			2	bidang	2	bidang	100%	2 bidang	100%	2 bidang	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	terpenuhinya surat-surat kendaraan sesuai ketentuan										100%	100%	100%	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	Pembayaran PBB untuk gedung kantor/rumdin/mess tepat waktu	100	%			6	SPPT	6	SPPT	100%	6 SPPT	100%	6 SPPT	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	Pembayaran PBB tanah milik Pemda	100	%			198	tanah	198	tanah	100%	223 bidang	100%	223 bidang	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	Terwujudnya rumah dinas dan mess yang layak dan nyaman					6	rumah	6	rumah	100%	7 rumdin	70%	7 rumdin	70%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	terpeliharanya kendaraan dinas										13 unit	82%	13 unit	82%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	Terpantaunya Penggunaan/Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Sesuai Tujuan	4	kegiatan			4	laporan	4	laporan	100%	4 laporan	52%	4 laporan	100%

Keterangan : *) Data sampai dengan Triwulan II 2018

B. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang

Renja Perubahan Tahun 2018 merupakan tahun kedua perencanaan pada Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016 - 2021. Sedangkan Renja tahun 2016 masih berpedoman pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2011 - 2015, mengingat penyusunan Renja 2016 dilaksanakan pada tahun 2015 sehingga pada saat itu Renstra Perangkat Daerah periode 2016-2021 belum disusun. Oleh sebab itu renja tahun 2016 merupakan renja pada saat transisi. Hal tersebut guna menjaga kesinambungan program pemerintah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Adapun penyusunan Renja Perubahan 2018 berdasarkan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang mengacu pada RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, yaitu untuk mencapai tujuan Magelang sebagai Kota jasa yang berbudaya, maju dan berdaya saing dalam masyarakat madani. Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara seksama, berdasarkan identifikasi masalah, mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah.

Pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada tahun 2018 secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021, yang berarti target dalam Renstra hampir semua tercapai atau dengan kata lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi beban tahun yang bersangkutan. Hal tersebut tercermin dalam Tabel 2.1 yang berisi Rekapitulasi, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Adapun pencapaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 adalah sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2017	2018	2019	2020	2017	2018 *)	2019	2020	
1	Derajat otonomi fiskal		25,86%	29,82%	31,96%	33,88%	34,82%	36,64%	31,96%	33,88%	
2	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat		73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	61,16%	67,28%	67,45%	65,79%	
3	Rasio pajak daerah terhadap PAD		13,48%	12,56%	12,33%	12,15%	13,36%	12,95%	12,33%	12,15%	
4	Rasio retribusi daerah terhadap PAD		4,20 %	3,63 %	3,33 %	3,1%	2,67%	2,18%	3,33 %	3,1%	
5	Prosentase pertumbuhan PAD		18,44%	19,18 %	12,83 %	11,37%	5,67%	7,32%	12,83 %	11,37%	
6	Penerapan ASB dalam proses penganggaran		100 %	100 %	100 %	Ya	100 %	100%	100 %	Ya	
7	Persetujuan Raperda tentang APBD		Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu IV November	-	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	
8	Persetujuan Raperda tentang APBD Perubahan		Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu IV September	-	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	
9	Prosentase pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Jumlah sisdu pengelolaan keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan		1	5	5	5	5	-	5	5	
11	Prosentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP		81%	84%	87%	90%	100%	100%	87%	90%	
12	Persetujuan Perda Pertanggungjawaban APBD		Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni	Evaluasi Gubernur	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	

13	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang		60%	65%	70%	100%	72,44%	72,44%	70%	100%	
14	Barang Milik yang didayagunakan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu		50%	75%	100%	100%	100%	89,65%	100%	100%	
16	Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Keterangan : *) Data sampai dengan Triwulan II 2018

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPKAD Kota Magelang

Perubahan dan penyesuaian kelembagaan di jajaran Pemerintah Kota Magelang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Hal ini merupakan tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab sebagai implementasi asas desentralisasi. Tuntutan adanya peningkatan kemampuan dan kebutuhan profesionalitas aparat yang memiliki kompetensi menjadi hal yang mutlak. Tersedianya aparat yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan profesionalitas aparatur pemerintah daerah. Terwujudnya aparat yang profesional diindikasikan dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Di samping itu, terciptanya efektivitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan tentunya akan dapat semakin meningkatkan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Termasuk dengan pemanfaatan teknologi informatika dalam layanan dan informasi pelaksanaan tugas.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang semakin memadai merupakan salah satu indikator berjalannya pelayanan OPD dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya sangat berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan mendesak harus dapat dipenuhi demi terwujudnya pelayanan prima.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tidak dapat dihindari adanya permasalahan dan hambatan yang patut diperhatikan dan diatasi sehingga tidak menjadi semakin besar dan pada akhirnya akan menghambat pencapaian target kinerja OPD. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sesuai tugas

pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya, dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memiliki tugas salah satunya yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang terampil serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang berupa hambatan/resiko beserta langkah antisipatifnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Resiko/Hambatan	Langkah Antisipatif
1.	Implementasi transaksi non tunai yang belum sepenuhnya bisa diterapkan.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi di OPD-OPD.
2.	Persiapan data e_planning yang belum optimal sehingga implementasi e_planning dan e_budgetting belum bisa terintegrasi secara komprehensif.	Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi pembenahan sistem secara kontinyu dan terus menerus antara e_planning dan e_budgetting.
3.	Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) belum dilaksanakan secara akrual murni atau kadar akrualnya masih rendah.	Dengan terus melakukan pembenahan pada penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang ada pada masing-masing OPD melalui sosialisasi, bimbingan teknis maupun asistensi.

2. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kinerja pelayanan maupun pengelolaan pendapatan daerah di BPKAD Kota Magelang bisa dikatakan sudah on the track atau cukup baik. Hal ini didasarkan pada capaian realisasi pendapatan sampai dengan Semester I tahun berkenaan yang selalu bisa melampaui target sebesar 50%. Hal tersebut bisa dilihat pada gambar diagram realisasi penerimaan PAD selama 4 (empat) tahun terakhir dibawah ini :



Namun demikian di dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah ini agar terus berjalan baik dan meningkat tentu tidak lepas dari berbagai hambatan maupun resiko yang menyertainya. Adapun beberapa isu penting dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah yang berupa hambatan/resiko beserta langkah antisipatifnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Resiko/Hambatan	Langkah Antisipatif
1.	Masih terdapat Wajib Pajak-Wajib Pajak yang bandel, yang enggan atau tidak mau mematuhi regulasi-regulasi dalam pemungutan pajak daerah.	-Membentuk tim khusus yang bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bandel. Tim ini merupakan gabungan dari BPKAD, Inspektorat, Bag. Hukum serta Satpol PP Kota Magelang.
2.	Belum optimalnya sistem pajak online, yaitu dengan masih terdapatnya pajak yang terpisah antara proses perijinan dengan proses pembayarannya.	Penerapan One Gate One Payment Tax dengan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI).
3.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan limpahan dari Kantor Pelayanan Pajak ke Pemerintah Kota Magelang pada Tahun 2012 apabila tidak dilakukan penghapusan piutang akan tetap muncul terus di Neraca pemerintah Kota Magelang sehingga mempengaruhi secara material terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah saat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	- Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang bertugas melaksanakan rekam Objek Pajak yang masuk dalam daftar piutang PBB-P2 serta melakukan verifikasi dan validasi terhadap piutang yang sudah kadaluarsa tersebut melalui mekanisme Hapus Buku/Hapus Tagih.

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Guna mewujudkan tertib administrasi dan juga pemanfaatan Barang Milik Daerah juga diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang terampil serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang berupa hambatan/resiko beserta langkah antisipatifnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Resiko/Hambatan	Langkah Antisipatif
1.	Belum optimalnya pemahaman pengelolaan asset maupun barang milik daerah yang terdapat di OPD-OPD.	Melakukan pembinaan, rekonsiliasi, dan asistensi secara kontinyu kepada Pengurus Barang di OPD-OPD.
2.	Belum optimalnya Sistem Pengelolaan BMD secara online.	Melakukan pengembangan terhadap aplikasi pengelolaan BMD yang ada khususnya sistem Informasi Persediaan Barang.
3.	Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dengan perangkat daerah yang mengelola asset milik Pemerintah Kota Magelang.	Melaksanakan koordinasi secara rutin/berkala.

D. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

RKPD Perubahan adalah salah satu acuan bagi setiap perangkat daerah dalam penyusunan Renja OPD, selain RENSTRA OPD. RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah. Oleh karenanya rancangan awal RKPD seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang kemudian mereview rancangan awal Perubahan RKPD yang disandingkan dengan kebutuhan OPD dengan hasil bahwa program dan kegiatan yang terdapat dalam Perubahan Renja BPKAD Kota Magelang sudah tercantum semua dalam rancangan Perubahan RKPD Kota Magelang.

Pada Perubahan Rencana Kerja BPKAD Kota Magelang Tahun 2018 ini telah disusun sesuai dengan analisa kebutuhan yang ada. dan tentu tidak luput dari beberapa pergeseran maupun perubahan angka pagu indikatif. Tetapi untuk usulan program dan kegiatan secara keseluruhan tidak berubah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Keuangan adalah *"Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif"*

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif.

Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien

Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel.

Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif.
- Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi BPKAD Kota Magelang untuk:

1. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
3. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

Adapun identifikasi isu-isu strategis yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Identifikasi Isu-isu Strategis
Pelayanan OPD**

No.	Identifikasi Isu dan Masalah Strategis		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kota
1.	Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai	Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana	Belum optimalnya sistem pajak

No.	Identifikasi Isu dan Masalah Strategis		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kota
	keseimbangan pembangunan	teknologi komunikasi dan informasi	online
2.	Tata kelola dan reformasi birokrasi	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Law enforcement belum sepenuhnya dijalankan yaitu denda pajak bagi WP yang menunggak pembayaran pajaknya
3.	Keuangan Negara	Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar tanpa Pengecualian	Belum optimalnya penggunaan instrumen Analisis Standar Biaya (ASB) perencanaan penganggaran dalam penyusunan penganggaran
4.	Keuangan Negara	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	Belum optimalnya pemahaman pengelola keuangan Perangkat Daerah atas penerapan Standar Akuntansi

No.	Identifikasi Isu dan Masalah Strategis		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kota
			Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021, maka tujuan dan sasaran pada Renja Perubahan Tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berikut indikator kinerjanya sebagaimana tersaji dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Terwujudnya lingkungan kondusif yang memberikan rasa aman bagi masyarakat.	1. Derajat otonomi fiskal	21,40%	25,86%	29,82%	31,96%	33,88%	35,62%
			2. Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	80,27%	73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%
			3. Rasio pajak daerah terhadap PAD	13,24%	13,48%	12,56%	12,33%	12,15%	12%
			4. Ratio retribusi daerah terhadap PAD	3,12%	4,20%	6,36%	3,33%	3,1%	2,91%
			5. Prosentase pertumbuhan PAD	16,57%	18,44%	19,18%	12,83%	11,37%	10,21%
2.	Mewujudkan sistem penganggaran yang efektif dan efisien	1. Terwujudnya anggaran belanja pemerintah daerah yang berbasis kinerja	1. Penerapan ASB dalam proses penganggaran	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		2. Terwujudnya efektifitas proses penganggaran daerah	1. Persetujuan Raperda tentang APBD	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November
			2. Persetujuan Raperda tentang APBD Perubahan	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September

3.	Mewujudkan penatausahaan keuangan yang efektif dan transparan	1. Terciptanya tertib administrasi pencairan dana	1. Prosentase pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Terwujudnya penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Jumlah sisdu pengelolaan keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan	1	1	5	5	5	5
4.	Mewujudkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah	1. Terciptanya laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	1. Prosentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	78%	81%	84%	87%	90%	90%
5.	Mewujudkan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	1. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	55%	60%	70%	100%	100%	100%
			2. Barang Milik yang didayagunakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu	50%	50%	70%	100%	100%	100%
			4. Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu	50%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang bersama perangkat daerah terkait berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah dan berperan serta dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang modern, cerdas, sejahtera dan religius.

C. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan renja tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan program dan kegiatan yang masuk dalam empat kategori program prioritas sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD tahun 2018. Adapun ketentuan tentang keempat program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program prioritas pertama merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2018 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu program dalam memperkuat implementasi Masterplan Smartcity.
2. Program prioritas kedua merupakan program daerah dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD 2016-2021.
3. Program prioritas ketiga merupakan program daerah dalam rangka percepatan pencapaian indikator kinerja daerah.
4. Program prioritas keempat merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap OPD.

Adapun rekapitulasi program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 sebagaimana yang tersaji dalam Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2018 untuk OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terdiri dari 7 (tujuh) program dan 130 (seratus tiga puluh) kegiatan atau bertambah 8 (delapan) kegiatan jika dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang tercantum RKPD Kota Magelang/Renja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018. Jumlah kegiatan yang mengalami pergeseran / pengurangan / penambahan anggaran sebanyak 8 (delapan) kegiatan yang terbagi dalam 3 (tiga) program.

Ketujuh program yang tercantum dalam Perubahan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terbagi dalam program yang ada di setiap perangkat daerah serta program-program sesuai urusan yang menjadi tanggung jawab setiap perangkat daerah masing-masing sebanyak 3 (tiga) program. Total pagu indikatif / kebutuhan dana dalam Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk Tahun 2018 sebesar Rp. 20.084.732.000,00 naik sebesar 17,58% atau Rp. 3.003.395.000,00 dari APBD tahun 2018, dengan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU). Berikut disampaikan rincian ketujuh program tersebut:

1. Program yang ada di setiap perangkat daerah, yaitu:
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 14 (empat belas) kegiatan, dengan total anggaran program sebesar Rp. 2.096.116.000,00;
 - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan 9 (sembilan) kegiatan, dengan total anggaran program sebesar Rp. 2.360.268.000,00;
 - c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan 6 (enam) kegiatan, dengan total anggaran program sebesar Rp. 217.191.000,00;
 - d. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah, dengan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 124.850.000,00;
2. Program yang menjadi tanggung jawab setiap perangkat daerah sesuai urusannya, yaitu:
 - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 48 (empat puluh delapan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.463.904.000,00;

- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 20 (dua puluh) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.099.144.000,00;
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.723.259.000,00;

Secara lebih lengkap program dan kegiatan dimaksud tersaji dalam Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 dan Perubahan Tahun 2018 sebagai berikut:

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018
DAN PERUBAHAN TAHUN 2018

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						SUMBER DANA	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2018	RENJA 2018	TARGET APBD	APBD 2018	TARGET RENJA P 2018	RENJA P 2018		
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan									
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			313.647.000		588.507.000		611.530.000		
1	4.4.15.12	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Laporan Keuangan OPD yang akuntabel				111.590.000	29 OPD	111.590.000	DAU	Memperkuat Implementasi Masterplan Smartcity
2	4.4.15.114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	laporan database BPKAD	0	0	0	31.805.000	4 laporan	31.805.000	DAU	ExBAU
3	4.4.15.135	Penyusunan Raperda Tentang Pencabutan Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan	Tercabutnya Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	1 Raperda	21.682.000	DAU	Rencana
4	4.4.15.18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	laporan posisi kas daerah setiap bulan	12	60.000.000	12	33.900.000	12 laporan	33.900.000	DAU	Rencana
5	4.4.15.131	Workshop penyusunan APBD	Meningkatnya pengetahuan tentang penyusunan APBD	0	12.889.000		0	50 orang	0	DAU	Rencana
6	4.4.15.115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi	0	0	0	176.747.000	29 OPD	190.884.000	DAU	Rencana
7	4.4.15.96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	perwal ASB	3	124.538.000	3	124.398.000	3 dokumen	111.602.000	DAU	Rencana

8	4.4.15.60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	laporan bulanan	100	116.220.000	100	110.067.000	12 laporan	110.067.000	DAU	Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			2.277.227.000		2.303.278.000		2.332.328.000		
1	4.4.15.56	Penataan Dokumen Anggaran Elektronik	arsip dokumen anggaran dalam bentuk elektronik (perda APBD, perwal APBD, perda perubahan APBD, perwal perubahan APBD, RKA, DPA, anggaran kas, RKPA, DPPA, anggaran kas perubahan)	29	40.557.000	10	40.391.000	10 jenis dokumen	40.391.000	DAU	Rencana
2	4.4.15.53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	persetujuan dan pengesahan DPPA SKPD	29	54.429.000	48	48.676.000	29 OPD	48.676.000	DAU	Rencana
3	4.4.15.52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA SKPD yang diteliti	29	44.999.000	29	43.570.000	29 OPD	43.570.000	DAU	Rencana
4	4.4.15.49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	laporan informasi anggaran daerah 2020 dan perubahan 2019	2	25.108.000	2	32.878.000	2 laporan	36.688.000	DAU	Rencana
5	4.4.15.44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	terverifikasinya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului perubahan, pengelolaan anggaran	29	69.670.000	29	69.410.000	29 OPD	69.410.000	DAU	Rencana
6	4.4.15.25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD	29	49.364.000	29	49.280.000	29 OPD	49.280.000	DAU	Rencana
7	4.4.15.24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang diteliti	29	41.688.000	29	41.576.000	29 OPD	41.576.000	DAU	Rencana

8	4.4.15.23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen perubahan PPAS 2018	2	95.430.000	2	95.268.000	2 dokumen	95.268.000	DAU	Rencana
9	4.4.15.22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018	2	181.651.000	2	185.093.000	2 dokumen	185.093.000	DAU	Rencana
10	4.4.15.21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019	2	98.549.000	2	94.308.000	2 dokumen	94.308.000	DAU	Rencana
11	4.4.15.20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019	2	213.961.000	2	212.945.000	2 dokumen	212.945.000	DAU	Rencana
12	4.4.15.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentang penjabaran perubahan APBD	4	343.857.000	4	343.453.000	2 dokumen	343.453.000	DAU	Rencana
13	4.4.15.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	rancangan perda tentang perubahan APBD	4	349.841.000	4	367.550.000	2 dokumen	367.550.000	DAU	Rencana
14	4.4.15.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	rancangan perwal tentang APBD	3	241.496.000	3	240.892.000	3	240.892.000	DAU	Program prioritas RPJM
15	4.4.15.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	rancangan perda tentang APBD	4	426.627.000	4	437.988.000	1 Raperda	463.228.000	DAU	Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			505.794.000		447.154.000		448.354.000		
1	4.4.15.59	Penyusunan data keuangan daerah	jumlah data keuangan daerah	12	101.230.000	12	99.608.000	12 laporan	99.608.000	DAU	Rencana
2	4.4.15.66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	peserta workshop pengelola keuangan daerah bagi pegawai BPKAD	1	100.155.000	1	77.993.000	1 kegiatan	77.993.000	DAU	Rencana

3	4.4.15.65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	74	228.809.000	148	228.809.000	148 orang dan 1 aplikasi	230.009.000	DAU	Rencana
4	4.4.15.16	Penataan dokumen pencairan dana belanja langsung secara elektronik	file dokumen pencairan dana belanja langsung	3000	75.600.000	4	40.744.000	4 dokumen	40.744.000	DAU	Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			1.051.143.000		926.937.000		980.740.000		
1	4.4.15.107	Pembuatan Daftar Gaji	daftar gaji PNS	1400	131.474.000	470	129.594.000	470	129.594.000	DAU	Rencana
2	4.4.15.95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D	3000	26.925.000	4	26.925.000	4 jenis informasi	80.728.000	DAU	Rencana
3	4.4.15.91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan	100	127.063.000	1500	115.451.000	1500 berkas	115.451.000	DAU	Rencana
4	4.4.15.77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	jumlah SP2D yang diterbitkan	1350	75.706.000	1100	56.925.000	1100 SP2D	56.925.000	DAU	Rencana
5	4.4.15.57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	jumlah penatausahaan permohonan bantuan dan tak terduga	2500	187.101.000	800	159.202.000	800 berkas	159.202.000	DAU	Rencana
6	4.4.15.51	Penyusunan anggaran kas	surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah tentang penetapan anggaran kas	170	16.000.000	10	29.558.000	10 kegiatan	29.558.000	DAU	Rencana
7	4.4.15.43	Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan	1800	35.245.000	700	35.245.000	700 SPM	35.245.000	DAU	Rencana
8	4.4.15.32	Pengesahan dan penerbitan SPD	SPD yang diterbitkan	170	86.500.000	10	76.600.000	10 jenis	76.600.000	DAU	Rencana
9	4.4.15.30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan (jumlah SPM dan SP2D OPD yang teregistrasi)	3000	189.300.000	3000	146.321.000	3000 SP2D	146.321.000	DAU	Rencana

10	4.4.15.27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi SKPD	500	175.829.000	500	151.116.000	500 berkas	151.116.000	DAU	Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			1.578.132.000		1.607.430.000		1.660.141.000		
1	4.4.15.108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	pameran hasil pembangunan daerah	1	37.505.000	2	54.180.000	2 kegiatan	54.180.000	DAU	Rencana
2	4.4.15.104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan	12	452.253.000	12	467.753.000	12 laporan	467.753.000	DAU	Rencana
3	4.4.15.81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	1	55.880.000	1	55.880.000	1 dokumen	55.880.000	DAU	Rencana
4	4.4.15.72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah bendahara dan PPK yang dibina	100	254.334.000	120	255.483.000	120	304.595.000	DAU	Rencana
5	4.4.15.61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	tersusunnya laporan bulanan PPKD	12	64.412.000	12	61.118.000	12 laporan	61.118.000	DAU	Rencana
6	4.4.15.48	Penyusunan laporan pajak	jumlah laporan pajak bulanan	12	90.571.000	12	88.660.000	12 laporan	88.660.000	DAU	Rencana
7	4.4.15.42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	laporan keuangan OPD yang diteliti	348	125.592.000	348	123.696.000	348	123.696.000	DAU	Rencana
8	4.4.15.36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	12	209.121.000	12	251.645.000	12 dokumen	254.044.000	DAU	Rencana
9	4.4.15.13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	3	288.464.000	1	249.015.000	1 aplikasi	250.215.000	DAU	Program prioritas RPJM

	4.4.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			254.236.000		214.234.000		217.191.000		
1	4.4.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKPA	2	43.390.000	2	51.660.000	2 dokumen	48.510.000	DAU	ExBAU
2	4.4.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1	12.851.000	1	10.651.000	1 dokumen	10.651.000	DAU	ExBAU
3	4.4.6.20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	jumlah SPJ OPD dan SKPKD yang diverifikasi	12	91.736.000	1500	86.823.000	1500 berkas	92.930.000	DAU	Rencana
4	4.4.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	renja penetapan dan renja perubahan	2	21.101.000	2	7.000.000	2 dokumen	7.000.000	DAU	ExBAU
5	4.4.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	2	15.055.000	2	14.100.000	2 laporan	14.100.000	DAU	ExBAU
6	4.4.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	laporan evaluasi kinerja OPD	12	70.103.000	12	44.000.000	12 laporan	44.000.000	DAU	ExBAU
	4.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			248.800.000		396.520.000		286.662.000		
1	4.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa rekening telepon, air, listrik, faksimili dan internet	12	247.800.000	12	395.520.000	12 bulan	285.662.000	DAU	ExBAU
2	4.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat masuk dan keluar	12	1.000.000	12	1.000.000	12 bulan	1.000.000	DAU	ExBAU
	4.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.857.320.000		1.817.492.000		1.809.454.000		
1	4.4.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian	82	125.000.000	82	126.992.000	82 file	130.877.000	DAU	ExBAU
2	4.4.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan	23	446.665.000	7	165.877.000	7 orang	169.475.000	DAU	ExBAU
3	4.4.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi antar daerah	12	225.475.000	12	170.000.000	12 bulan	260.320.000	DAU	ExBAU

4	4.4.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12	107.004.000	12	108.240.000	12 bulan	130.000.000	DAU	ExBAU
5	4.4.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya logistik kantor	24	12.672.000	3	13.080.000	3 jenis	13.080.000	DAU	ExBAU
6	4.4.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	2	20.000.000	2	20.000.000	2 jenis	20.000.000	DAU	ExBAU
7	4.4.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan penerangan gedung	12	26.285.000	26	24.000.000	26 jenis	24.000.000	DAU	ExBAU
8	4.4.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	32.751.000	18	32.751.000	18 jenis	32.751.000	DAU	ExBAU
9	4.4.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12	41.000.000	51	34.500.000	51 jenis	34.500.000	DAU	ExBAU
10	4.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa dan peralatan	12	64.582.000	12	66.166.000	12 bulan	68.565.000	DAU	ExBAU
11	4.4.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	perpanjangan STNK dan KIR pick up	64	18.900.000	79	18.900.000	79 kendaraan	18.900.000	DAU	ExBAU
12	4.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa tenaga administrasi keuangan	12	736.986.000	12	1.036.986.000	12 bulan	906.986.000	DAU	ExBAU
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			84.578.000		82.598.000		38.520.000		
1	4.4.15.111	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	dokumen pedoman penganggaran daerah	2	44.078.000	1	44.078.000	1 dokumen	0	DAU	Program prioritas RPJM
2	4.4.15.4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	sistem pengelolaan keuangan daerah	1	40.500.000	1	38.520.000	1 dokumen	38.520.000	DAU	Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			396.789.000		392.291.000		392.291.000		
1	4.4.15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perwal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	120	196.711.000	1	192.213.000	1 perwal	192.213.000	DAU	Rencana

2	4.4.15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perda tentang pertanggungjawaban APBD	520	200.078.000	1	200.078.000	1 perda	200.078.000	DAU	Rencana
	4.4.18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah			2.665.378.000		2.738.170.000		3.099.144.000		
1	4.4.18.21	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah	Buku Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah	1	61.834.000	1	60.034.000	1 perwal	0	DAU	Rencana
2	4.4.18.20	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah	perwal PBB	0	0	0	0	2 raperwal	35.885.000	DAU	Rencana
3	4.4.18.10	Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	Laporan penatausahaan dokumen dan wajib pajak reklame		73.899.000		81.099.000	12 laporan dan 800 WP	81.099.000	DAU	Rencana
4	4.4.18.27	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah	12	51.731.000	12	51.731.000	12 bulan	51.731.000	DAU	Rencana
5	4.4.18.19	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Raperda Retribusi Perizinan Tertentu	0	0	0	0	1 Raperda	79.538.000	DAU	Rencana
6	4.4.18.16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta	200	55.052.000	540	55.052.000	540 WP	65.992.000	DAU	Rencana
7	4.4.18.14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16	140.049.000	16	133.806.000	16 laporan	133.806.000	DAU	Rencana
8	4.4.18.7	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	laporan administrasi PBB-P2 (12 laporan penerimaan PBB, 12 laporan jenis pelayanan PBB, 4 laporan realisasi piutang PBB)	28	207.360.000	28	200.160.000	28 laporan	200.160.000	DAU	Rencana

9	4.4.18.17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	50	119.916.000	50	103.680.000	50 SK	103.680.000	DAU	Rencana
11	4.4.18.15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	100	281.946.000	17	281.946.000	17 kelurahan	286.946.000	DAU	Rencana
12	4.4.18.13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	20	51.357.000	4	34.560.000	4 LHP atas wajib pajak	73.920.000	DAU	Rencana
13	4.4.18.12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD	12	114.730.000	12	113.247.000	12 bulan	113.247.000	DAU	Rencana
14	4.4.18.11	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	penghapusan data piutang	6	145.613.000	6	145.613.000	6 bulan	145.613.000	DAU	Rencana
15	4.4.18.9	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	12	389.019.000	12	382.689.000	12 bulan	400.189.000	DAU	Rencana
16	4.4.18.6	Intensifikasi Pemungutan PBB	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT	4	281.448.000	3 dan 36.200	328.216.000	3 keg dan 36.200 SPPT	376.705.000	DAU	Rencana
17	4.4.18.5	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggal Pajak Daerah	data tunggakan pajak daerah yang tersedia	120	160.783.000	120	160.783.000	120 data wajib pajak	160.783.000	DAU	Rencana
18	4.4.18.4	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak	12	126.500.000	12	126.500.000	12 laporan	126.500.000	DAU	Rencana
19	4.4.18.24	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlayannya wajib pajak BPHTB	12	125.896.000	24	122.929.000	24 laporan	122.929.000	DAU	Rencana

20	4.4.18.2	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	laporan potensi subyek dan obyek pajak	2	38.463.000	4	40.263.000	4 laporan	40.263.000	DAU	Rencana
21	4.4.18.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	4	239.782.000	4	315.862.000	4 laporan dan 1 keg	500.158.000	DAU	Rencana, Program prioritas RPJM
	4.4.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			711.140.000		1.139.040.000		2.360.268.000		
1	4.4.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	AC, mic, wireless, stand mic, proyektor	0	0	4	133.950.000	8 set	476.835.000	DAU	ExBAU
2	4.4.2.10	Pengadaan mebeleur	Kenyamanan pelaksanaan tugas					1 jenis	85.250.000	DAU	ExBAU
3	4.4.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Ruangan Ka. Badan dan Ruang Rapat bekas Depo Arsip	0	0	1	295.000.000	2 ruangan	651.261.000	DAU	ExBAU
4	4.4.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	komputer, laptop, printer, scanner, mesin perforasi, UPS	0	0	0	0	12 jenis	419.112.000	DAU	ExBAU
5	4.4.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki	20	7.200.000	24	7.200.000	24 buah	7.200.000	DAU	ExBAU
6	4.4.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	7	213.675.000	7	210.175.000	7 jenis	210.175.000	DAU	ExBAU
7	4.4.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	33	37.510.000	36	39.960.000	36 unit	39.960.000	DAU	ExBAU
8	4.4.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas terpelihara	64	372.340.000	70	372.340.000	70 unit	372.340.000	DAU	ExBAU
9	4.4.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung yang terpelihara	1	80.415.000	1	80.415.000	1 unit	98.135.000	DAU	ExBAU

	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan									
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			139.610.000		124.850.000		124.850.000		
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah arsip yang tertata	6	139.610.000	6	124.850.000	6	124.850.000	DAU	ExBAU
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan									
1	4.4.19.1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	nilai dasar penjualan BMD	3	50.240.000	3	51.275.000	1 kegiatan	33.305.000	DAU	Rencana
2	4.4.19.2	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	tersedianya hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD	1	99.960.000	10	105.404.000	2 kegiatan	110.366.000	DAU	Rencana
3	4.4.19.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	3	365.574.000	3	409.495.000	3 unit	427.214.000	DAU	Rencana
4	4.4.19.25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	tanah yang diukur	2	13.320.000	2	13.770.000	2 bidang	13.770.000	DAU	Program prioritas RPJM
5	4.4.19.23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	terlaksananya proses pensertifikatan tanah	12	321.319.000	12	323.765.000	12 sertifikat	320.627.000	DAU	Program prioritas RPJM
6	4.4.19.26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	perpanjangan 14 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 3 bus	10	11.390.000	100	17.248.000	79 kendaraan	30.463.000	DAU	Rencana
7	4.4.19.21	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	pemanfaatan dan panatagunaan tanah Pemkot	3	59.402.000	3	54.452.000	3 kecamatan	54.452.000	DAU	Rencana
8	4.4.19.6	Pembangunan Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Magelang	Jalan di Komplek Belakang Kantor Walikota Magelang	0	0	1	297.600.000	1 paket	532.616.000	DAU	Implementasi Kawasan Strategis dan Prioritas, Rencana
9	4.4.19.41	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		0	0	0	4 jenis	84.287.000	DAU	ExBAU

10	4.4.19.10	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Pagar depan Rumah Dinas				0	1 paket	151.130.000	DAU	Rencana
11	4.4.19.36	Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	0	0	2 paket	256.661.000	DAU	Rencana
12	4.4.19.5	Pengadaan Mebeleur	Mebeleur milik Pengelola Barang				0	1 jenis	15.890.000	DAU	Rencana
13	4.4.19.3	Pemusnahan Barang Milik Daerah	Berita acara pemusnahan aset	1	20.237.000	1	20.108.000	2 dokumen	261.408.000	DAU	Rencana
14	4.4.19.15	Penjualan aset daerah	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual	1	78.647.000	3	89.768.000	5 kegiatan	94.948.000	DAU	Rencana
15	4.4.19.4	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	tersedianya berita acara penelitian untuk penjualan dan/atau pemusnahan	0	0	3	17.849.000	1 kegiatan	24.090.000	DAU	Rencana
16	4.4.19.17	Penaksiran barang milik daerah	penaksiran barang milik daerah	4	77.345.000	3	66.843.000	7 keg	98.543.000	DAU	Rencana
17	4.4.19.13	Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	pengelolaan BMD	16	548.324.000	16	492.700.000	12 orang	493.837.000	DAU	Rencana
18	4.4.19.30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun	7	577.030.000	7	617.542.000	7 rumdin	634.331.000	DAU	Rencana
19	4.4.19.29	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	data barang milik daerah yang mutakhir	12	156.311.000	12	142.444.000	12 bulan	142.444.000	DAU	Rencana
20	4.4.19.12	Penghapusan Asset	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak	1	40.978.000	2	40.978.000	5 paket	77.588.000	DAU	Rencana
21	4.4.19.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	2	58.115.000	2	73.075.000	2 lapangan	300.646.000	DAU	Rencana
22	4.4.19.16	Penyelamatan aset daerah	terlaksananya penyelamatan aset daerah	12	216.471.000	12	214.490.000	2 dokumen	214.490.000	DAU	Program prioritas RPJM

23	4.4.19.20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah	2	115.190.000	2	124.086.000	2 dokumen	124.086.000	DAU	Rencana
24	4.4.19.18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD	4	106.593.000	29	131.745.000	29 OPD	137.144.000	DAU	Rencana
25	4.4.19.14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	laporan barang milik daerah	6	83.735.000	8	145.400.000	8 jenis	145.400.000	DAU	Program prioritas RPJM
26	4.4.19.22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	hasil penelitian status hak atas tanah negara yang dimohon warga	100	41.581.000	100	39.700.000	100%	39.700.000	DAU	Rencana
27	4.4.19.19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	dokumen pemanfaatan BMD	7	109.609.000	7	123.735.000	7 kategori	123.735.000	DAU	Program prioritas RPJM
28	4.4.19.24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	laporan data tanah milik Pemkot	1	88.162.000	1	87.529.000	2 laporan dan 1 unit	175.854.000	DAU	Program prioritas RPJM
29	4.4.19.27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	jumlah pembayaran PBB gedung kantor	100	31.100.000	6	30.400.000	6 SPPT	30.400.000	DAU	Rencana
30	4.4.19.32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemkot Magelang	4	74.048.000	4	58.453.000	4 laporan	58.453.000	DAU	Rencana
31	4.4.19.31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas di bawah pengelola barang terpelihara	10	322.272.000	13	450.064.000	13 unit	452.463.000	DAU	Rencana
32	4.4.19.28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	jumlah pembayaran PBB tanah Pemda	100	47.700.000	3	62.918.000	3 kecamatan	62.918.000	DAU	Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
				TOTAL	15.798.447.000		17.081.337.000		20.084.732.000		

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Kota Magelang selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2018. Tujuan penyusunan Perubahan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2018 serta mengacu pada perencanaan tahun kedua Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021. Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian indikator RPJMD sampai dengan Semester I Tahun 2018.

Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 sangat terbatas, hanya pada Triwulan IV Tahun 2018, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan. Sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam RPJMD maupun Renstra.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renstra namun tidak tercantum dalam renja dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, indikator kinerja telah tercapai pada tahun sebelumnya, adanya penyesuaian nama program dan kegiatan demi keselarasan indikator kinerja maupun perubahan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renja namun tidak terdapat dalam Renstra dimungkinkan dengan kriteria dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD, adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan serta capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan belum terpenuhi.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Semester I. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG



LARSITA